

**PARTISIPASI GENERESI MUDA ERA DIGITAL MENJELANG PILKADA
JAWA TENGAH 2024 DI KECAMATAN NGALIYAN, KELURAHAN
NGALIYAN, SEMARANG, JAWA TENGAH**

Najwa Qurrotu'ain Muntaz, Yulita Nilam Fridiyanti

Universitas Wahid Hasyim

Najwamuntaz@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi partisipasi generasi muda dalam konteks menjelang Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah tahun 2024. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap sejumlah partisipan generasi muda yang aktif dalam proses politik pra-pemilu. Analisis data dilakukan dengan fokus pada motivasi, hambatan, dan dampak dari partisipasi politik mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti teknologi informasi, keinginan untuk perubahan sosial, dan pendidikan politik memainkan peran krusial dalam mendorong partisipasi generasi muda. Implikasi dari temuan ini untuk pengembangan strategi partisipasi politik yang lebih inklusif di masa depan juga dibahas.

Kata kunci: partisipasi politik, generasi muda, Pemilihan Kepala Daerah, Jawa Tengah

A. PENDAHULUAN

Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah berbeda dengan pemilu, pemilu dilaksanakan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPDP RI, dan DPD Kota/Kabupaten. Pilkada dilaksanakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berdasarkan data KPU Pilkada serentak 2024 diikuti sebanyak 545 daerah di Indonesia, meliputi 37 provinsi, 508 kabupaten/kota rencananya akan digelar pada 27 November 2024. (Levrita Rahayunie 2024)

Pilkada yang akan berlangsung mendatang terdapat pemilih pemuda yang notabene nya anak muda atau generasi milenial dan generasi Z sebanyak 56% dari 204 juta pemilih. (N.n 2024) Generasi milenial merupakan generasi yang lahir pada tahun 1981-1996 dan generasi Z lahir pada tahun 1997-2012 (Hidayat 2023). Tentunya yang dimana generasi muda adalah generasi penerus bangsa artinya partisipasi dan keikutsertaan generasi ini mencerminkan rasa tanggung jawab dan kepedulian untuk bersama-sama membangun masa depan dan kemajuan bangsa.

Mirisnya, partisipasi pemuda dalam Pilkada masih jauh dari harapan. Berbagai data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemuda sangat rendah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini teridentifikasi ternyata bagi kaum muda, politik seringkali

dianggap terlalu formal, bahkan banyak diantara mereka yang menolak berbicara tentang politik. Partisipasi pemuda yang rendah dapat menghambat proses pergantian pemimpin dan dapat memperlambat laju pembangunan bangsa. (Fatma, Sjoraida Diah; Ruchiat, Nugraha Aat; 2023)

Seiring perkembangan teknologi dan media sosial memberi dampak yang signifikan pada jalannya Pemilu maupun Pilkada mendatang. Salah satunya menjadi sarana untuk mencari informasi yang mudah dan akurat terkait pilkada serta dapat mendorong partisipasi pemuda untuk ikut serta dalam Pilkada mendatang. Media sosial dan media massa menjadi platform penting untuk keberlangsungannya pilkada nanti, selain untuk akses mencari informasi media sosial dan media massa ini menjadi prantara untuk masyarakat agar mengenal dan mengetahui calon para pemimpin dan bahkan mampu berkomunikasi dengan para calon pemimpin kepala daerah. (Yahya, Arif; Febrianti, Diani; Rasyad, Irfan Fadli; 2024) Perkembangan ini tidak hanya berdampak positif tapi juga berdampak negatif karena penyebaran hoax yang semakin bertambah dan kurangnya keterampilan literasi digital para pemuda dapat membuat mereka mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat atau menyesatkan di media sosial. (Putra, Febriansyah; Patra, Haldi; 2023)

Walaupun demikian peran pemuda untuk pilkada mendatang tidak bisa di remehkan karena pemuda memiliki pengaruh besar, pertama mereka menjadi kontrol penjaga etika dan sistem demokrasi agar tidak terganggu, kedua mereka menjadi fasilitator dimana kampus menjadi salah satu wadah pendidikan politik juga berperan dalam advokasi pembela hak-hak demokrasi, ketiga mereka berperan sebagai edukator penyebaran informasi kepada masyarakat dan pemilih pemula. Oleh karena itu penyebaran informasi perlu diawasi agar tidak memicu polarisasi di masyarakat. generasi milenial merupakan generasi terbesar untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2024 nanti, kita harap agar pemuda juga berperan sebagai kontrol sosial bersama masyarakat untuk menyelenggarakan Pilkada dengan penuh integritas serta berjalan dengan damai, tertib, dan kondusif. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam otonomi daerah akan lebih merasakan manfaat dan kepemilikan atas pembangunan di daerahnya, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan. (Yahya, Arif; Febrianti, Diani; Rasyad, Irfan Fadli; 2024)

Tinjauan Pustaka

1. Pandea Bagus Adnyanaesa, I Wayan Utama (2023) yang berjudul "Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda". Penelitian ini membahas peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan

- partisipasi generasi muda dalam politik dan bagaimana mereka dapat mendorong pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum atau pilkada. (Adnyanaesa, Pandeia Bagus ; Utama, I Wayan; 2023)
2. Penelitian Yusrin Yusrin, Salpina Salpina (2023) yang berjudul “ Partisipasi Generasi Millenial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024”. Hasil penelitian ini adalah membahas bagaimana generasi milenial dapat terlibat dalam pengawasan pemilihan umum 2024 dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan politik mereka. (Yusrin, Yusrin ; Salpina , Salpina; 2023)
 3. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah
 - Penelitian Pandeia Bagus Adnyanaesa, I Wayan Utama (2023), berfokus dalam menjelaskan presentase rakyat menggunakan hak pilihnya. Sehingga penelitian Pandeia Bagus Adnyanaesa, I Wayan Utama (2023) bersifat faktual. penelitian metode ini deskriptif kualitatifata.
 - Penelitian Yusrin Yusrin, Salpina Salpina (2023), menjelaskan peran dan partisipasi dalam pengawasan berlangsungnya pemilu. Sehingga penelitian Yusrin Yusrin, Salpina Salpina (2023) bersifat spesifik. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif.
 - Sedangkan penelitian saya berfokus pada partisipasi *gen z* dan generasi milenial untuk berbondong-bondong mengajak semua kalangan yang berada dimanapun di seluruh Indonesia memberikan hak pilihnya agar makin berkembangnya negara kita.

B. METODE PENELITIAN

Artikel penelitian ini menggunakan pendekatan survei online dan *literature rivew* kualitatif. Variabel independen meliputi faktor demografis, pengetahuan dan minat politik, pengaruh sosial, dan akses terhadap informasi. Variabel dependen adalah intensi untuk memilih dan partisipasi politik lainnya (seperti, kampanye dan diskusi politik).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terpilihan pemerintah berkat rakyat yang ikut berpartisipasi dalam memilih baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dengan demikian, partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar dirinya diperintah orang kemudian menuntut diberikan hak suara dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Adnyanaesa, Pandeia Bagus; Utama, Wayan; 2023) Rasionalitas politik yang dimiliki

banyak pemilih baru sebagai pemilih pemula merupakan faktor penting dalam pilkada. Dalam pemilihan gubernur yang akan mendatang, terutama di Jawa Tengah sebagian pemilihnya adalah generasi z bahkan, partisipasi pemilih muda saat ini mencapai 82,5%. (Prasetyo, Kuncoro Bayu; Putri, Noviani Achmad; Pramoono, Didi; 2022)

Pemilih pemula sering terpengaruh oleh pilihan teman dan keluarganya. Mayoritas pemilih pemula ini, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan, mengikuti pendapat orang tua atau tokoh yang dihormati di sekitar mereka. Pemilih pemula ini cenderung meneruskan tradisi keluarga dengan memilih partai politik yang telah dipilih secara turun menurun oleh keluarga mereka dari generasi ke generasi. Namun, kaum pemilih pemula ini cenderung memilih calon gubernur yang terkenal meskipun mereka lebih memahami latar belakang dan tujuan calon tersebut. (Khakim, Muhammad Salisul; 2023)

Dengan munculnya anak muda yang menduduki posisi penting dalam politik Indonesia saat ini memberi pengaruh yang sangat positif karena generasi milenial memiliki kesadaran politik yang sangat tinggi dan baik. Harapannya generasi ini bisa memutus tradisi politik yang tidak baik apalagi sekarang kita hidup di *era digital* saat ini, kita dapat dengan cepat mengakses, mengirim, dan mendapatkan informasi apa pun, termasuk informasi tentang peristiwa politik. Generasi milenial dan anak muda sebenarnya tidak terlalu menyukai masalah politik. Namun, karena isu-isu ini mudah tersebar luas di era teknologi seperti saat ini, terutama saat ini, anak muda yang berpolitik memanfaatkan fenomena ini untuk mendorong semua orang untuk ikut serta dan memberikan hak suaranya.

Karena jumlah mereka yang signifikan dan potensi mereka sebagai agen perubahan, partisipasi politik generasi milenial di Indonesia sangat penting. Beberapa studi telah menemukan beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi mereka dalam pemilu, seperti milenial yang lebih sadar politik dan terlibat lebih aktif dalam pemilu cenderung lebih aktif. Faktor seperti pendidikan, akses ke informasi, dan pengalaman politik sebelumnya memengaruhi hal ini. Milenial terhadap institusi politik seperti KPU, partai politik, dan calon pemimpin memengaruhi partisipasi mereka. Golongan putih dan apatis dapat disebabkan oleh ketidakpercayaan. Minat terhadap Politik: Generasi milenial tertarik pada kebijakan publik dan politik, yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu. Mereka ingin suara mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan dan diwakili. Keyakinan milenial bahwa partisipasi mereka dapat memengaruhi proses politik mempengaruhi mereka. Rasa tidak berdaya atau apatis dapat menghentikan orang untuk berpartisipasi. (Jannah, Khai Rati; 2021)

Berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024, tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 dibagi menjadi 4 tahap utama, yaitu: Tahap Persiapan (14 Juni 2022 - 14 April 2024) Pembentukan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Penetapan jumlah kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemutakhiran data pemilih. Pencalonan anggota DPD. Pembentukan Sentra Gakkumdu. Penyusunan dan penetapan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Penyusunan dan penetapan Peraturan KPU tentang Kampanye. Penyusunan dan penetapan Peraturan KPU tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan.

Tahap Pencalonan (14 April 2024 - 29 Agustus 2024) pemenuhan syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon perseorangan, pencalonan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut pasangan calon, penyampaian visi dan misi pasangan calon, pemeriksaan kesehatan pasangan calon, penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat.

Tahap Kampanye (26 September 2024 - 23 November 2024) Kampanye oleh pasangan calon, debat antarpasangan calon, sosialisasi oleh KPU dan Bawaslu, pengawasan kampanye oleh Bawaslu, penyelesaian sengketa kampanye oleh Bawaslu dan DKPP. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara (27 November 2024) Pemungutan suara, penghitungan suara di TPS, pekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota, penetapan hasil rekapitulasi suara oleh KPU Kabupaten/Kota, pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Tahap Penetapan Hasil dan Pengesahan (28 November 2024 - 8 Desember 2024) Dimulai dari menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan oleh MK, penetapan hasil Pemilihan oleh KPU, pengesahan hasil Pemilihan oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pelantikan pasangan calon terpilih.

Seiring berjalannya pilkada serentak yang akan datang, pasti akan ada banyak masalah yang sering kali menjadi perhatian utama. Pilkada meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi lokal. Ini penting untuk memastikan representasi yang lebih baik dari kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Pengelolaan sumber daya publik, seperti anggaran dan tenaga kerja, serta kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan baru yang terpilih dalam pemilihan. Serta Pilkada sering menghasilkan pertarungan politik sengit

antara kandidat dan kelompok pendukung mereka. Hal ini dapat berdampak pada polarisasi politik dan kolaborasi antar kelompok di masyarakat. (Ferdinand, P; Arsyad, L; 2018)

Pilkada juga memiliki dampak yang signifikan yaitu pergantian kepemimpinan: pilkada menentukan siapa yang akan menjabat sebagai gubernur, bupati, atau walikota selama periode waktu tertentu. Perubahan kebijakan: Visi dan program yang dijanjikan selama kampanye dapat diubah melalui kepemimpinan baru. Partisipasi politik: Pilkada mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang pemimpin dan tujuan pembangunan di daerah. Konflik dan Polarisasi: Kampanye pilkada dapat menimbulkan polarisasi di masyarakat dan memicu konflik politik antara kandidat atau kelompok.

Salah satu komponen penting dari setiap pemilihan kepala daerah, atau pilkada, adalah kampanye pendidikan pemilih. Tujuan utama kampanye ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih dalam proses demokrasi, khususnya dalam hal memilih gubernur, bupati, atau walikota. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dijelaskan lebih detail tentang Kampanye Pendidikan Pemilih dalam Pilkada Tujuan dari Kampanye Pendidikan Pemilih adalah untuk memberi pemilih pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hak mereka untuk memilih, serta betapa pentingnya memilih pemimpin yang baik untuk masyarakat dan kemajuan daerah. Kampanye ini memberikan informasi tentang semua aspek proses pemilihan, mulai dari pendaftaran pemilih, penjadwalan pemungutan suara, hingga proses penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan. Pendidikan Hukum Pemilu berarti memahami hak dan kewajiban pemilih serta peran lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Memahami Isu Kampanye berarti memberi tahu pemilih tentang hal-hal penting yang menjadi fokus kampanye calon kepala daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

Peran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakat sipil dalam Pilkada 2024 sangat penting untuk memastikan transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Mereka tidak hanya harus mengawasi proses dan menjaga integritas, tetapi juga harus memberi tahu orang tentang pentingnya partisipasi demokratis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Diharapkan upaya mereka akan membuat proses pemilihan kepala daerah lebih adil, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, ada beberapa peran utama yang dapat dijelaskan. Pemantauan Proses Pemilu: LSM memantau setiap langkah dari kampanye hingga pemungutan suara dan penghitungan suara. Mereka menjamin bahwa

semua proses berjalan sesuai aturan dan tidak ada pelanggaran yang signifikan. Pengawasan Keuangan Kampanye: LSM mengawasi cara calon kepala daerah menggunakan dana kampanye. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kampanye dilakukan secara adil dan mencegah praktik politik uang yang melanggar undang-undang. Penyuluhan dan Pendidikan Pemilih, masyarakat sipil, dan LSM turut membantu pemilih memahami proses pemilu, hak dan kewajiban mereka, dan pentingnya berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah.

Partisipasi dalam debat publik dan diskusi sangat penting untuk Pilkada 2024 karena memungkinkan pemilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang visi, misi, dan rencana calon kepala daerah. Partisipasi dalam debat publik dan diskusi juga memperkuat demokrasi dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dengan demikian, partisipasi dalam debat publik dan diskusi juga akan membantu pemilih membuat keputusan yang lebih informasional. Tujuan debat publik dan diskusi selama Pilkada adalah untuk memberi calon kepala daerah kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka tentang berbagai masalah penting kepada pemilih. Tujuannya adalah agar pemilih dapat membuat keputusan yang cerdas dan mengetahui apa yang mereka lakukan. Isu-isu strategis yang relevan bagi masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, keamanan, dan lingkungan, sering kali menjadi subjek debat publik dan diskusi. Ini memungkinkan pemilih untuk mendengarkan berbagai pendapat dan cara setiap calon menangani masalah tersebut. Debat dan diskusi dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti debat langsung antara kandidat, forum diskusi terbuka dengan orang lain yang berpartisipasi, atau sesi tanya jawab dengan moderator. Setiap format dibuat untuk memungkinkan kandidat dan pemilih bertukar ide dan perspektif.

Karena Gen Z memiliki populasi terbesar di pemilihan pilkada 2024, meningkatkan partisipasi pemilih melalui media sosial dapat dicapai dengan mudah karena berbagai proses dan variabel yang dapat memengaruhinya. Media sosial memudahkan akses cepat dan mudah ke informasi terkini terkait calon, platform politik, dan masalah kampanye. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran pemilih tentang proses pemilihan dan pilihan yang mereka miliki. Media sosial memungkinkan calon dan pemilih berinteraksi secara langsung, seperti melalui sesi tanya jawab atau diskusi online. Ini memberi pemilih kesempatan untuk bertanya langsung kepada calon tentang rencana mereka dan mendapatkan jawaban secara langsung. Kampanye politik yang menggunakan media sosial memiliki kemampuan untuk memobilisasi basis pemilih, terutama generasi muda yang aktif di platform tersebut. Kampanye digital yang inovatif dan menarik dapat lebih efektif meningkatkan partisipasi

pemilih daripada strategi konvensional. Tokoh atau influencer di media sosial dapat memengaruhi pemilih. Mereka memiliki kemampuan untuk merekomendasikan atau mendukung kandidat tertentu yang mereka anggap memiliki tujuan dan platform yang sejalan dengan kepentingan atau prinsip pengikut mereka. Media sosial juga digunakan untuk penggalangan dana kampanye dan perekrutan sukarelawan. Memberi dukungan finansial atau sukarelawan dapat meningkatkan keterlibatan langsung dalam kampanye politik.

Banyak negara telah memutuskan untuk menggunakan teknologi pemilu untuk menjalankan pemilu yang demokratis karena berbagai kemudahan yang ditawarkannya. Salah satu negara yang menggunakan teknologi pemilu adalah Indonesia. Meskipun ada dampak yang baik dan buruk, ada juga dampak negatif. Misalnya, calon kandidat dan elit politik yang kalah dalam pemilu menggunakan momentum ini untuk memobilisasi massa, yang pada akhirnya membawa pada upaya untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Hal ini semakin dipengaruhi di *era post truth*, di mana isu-isu negatif dan berita palsu disebarluaskan melalui media sosial. (Mahpudin; 2019)

Menjelang Pilkada Jawa Tengah 2024, partisipasi generasi muda menjadi semakin penting dan penting berkat era teknologi. Generasi muda telah secara aktif memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk menyuarakan keinginan mereka, mengkritik, dan memberikan dukungan kepada proses politik. Studi menunjukkan bahwa teknologi sangat penting untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam politik. Itu menunjukkan peran pentingnya dengan memudahkan akses ke informasi, memungkinkan orang untuk berinteraksi secara langsung dengan calon, dan memungkinkan diskusi publik yang lebih terbuka dan terbuka. Fenomena ini menunjukkan bagaimana generasi muda terlibat dalam politik lokal dan mendorong masyarakat yang lebih terlibat dan demokratis di masa mendatang.

D. KESIMPULAN

Rasionalitas politik yang dimiliki banyak pemilih baru sebagai pemilih pemula merupakan faktor penting dalam pilkada. Dalam pemilihan gubernur yang akan mendatang, terutama di Jawa Tengah sebagian pemilihnya adalah generasi Z bahkan, partisipasi pemilih muda saat ini mencapai 82,5%. Pemilih pemula ini cenderung meneruskan tradisi keluarga dengan memilih partai politik yang telah dipilih secara turun menurun oleh keluarga mereka dari generasi ke generasi. Namun, kaum pemilih pemula ini cenderung memilih calon

gubernur yang terkenal meskipun mereka lebih memahami latar belakang dan tujuan calon tersebut. Dengan munculnya anak muda yang menduduki posisi penting dalam politik Indonesia saat ini memberi pengaruh yang sangat positif karena generasi milenial memiliki kesadaran politik yang sangat tinggi dan baik.

Harapannya generasi ini bisa memutus tradisi politik yang tidak baik apalagi sekarang kita hidup di era digital saat ini, kita dapat dengan cepat mengakses, mengirim, dan mendapatkan informasi apa pun, termasuk informasi tentang peristiwa politik. Generasi milenial dan anak muda sebenarnya tidak terlalu menyukai masalah politik. Namun, karena isu-isu ini mudah tersebar luas di era teknologi seperti saat ini, terutama saat ini, anak muda yang berpolitik memanfaatkan fenomena ini untuk mendorong semua orang untuk ikut serta dan memberikan hak suaranya. Karena jumlah mereka yang signifikan dan potensi mereka sebagai agen perubahan, partisipasi politik generasi milenial di Indonesia sangat penting. Beberapa studi telah menemukan beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi mereka dalam pemilu, seperti milenial yang lebih sadar politik dan terlibat lebih aktif dalam pemilu cenderung lebih aktif. Faktor seperti pendidikan, akses ke informasi, dan pengalaman politik sebelumnya memengaruhi hal ini. Milenial terhadap institusi politik seperti KPU, partai politik, dan calon pemimpin memengaruhi partisipasi mereka. Minat terhadap Politik: Generasi milenial tertarik pada kebijakan publik dan politik, yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu. Keyakinan milenial bahwa partisipasi mereka dapat memengaruhi proses politik mempengaruhi mereka. Penyusunan dan penetapan Peraturan KPU tentang Kampanye. Penyusunan dan penetapan Peraturan KPU tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan. Ini penting untuk memastikan representasi yang lebih baik dari kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Pengelolaan sumber daya publik, seperti anggaran dan tenaga kerja, serta kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan baru yang terpilih dalam pemilihan. Serta Pilkada sering menghasilkan pertarungan politik sengit antara kandidat dan kelompok pendukung mereka. Hal ini dapat berdampak pada polarisasi politik dan kolaborasi antar kelompok di masyarakat. Perubahan Kebijakan: Visi dan program yang dijanjikan selama kampanye dapat diubah melalui kepemimpinan baru. Partisipasi Politik: Pilkada mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang pemimpin dan tujuan pembangunan di daerah. Konflik dan Polarisasi: Kampanye Pilkada dapat menimbulkan polarisasi di masyarakat dan memicu konflik politik antara kandidat atau kelompok.

Misalnya, calon kandidat dan elit politik yang kalah dalam pemilu menggunakan momentum ini untuk memobilisasi massa, yang pada akhirnya membawa pada upaya untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Salah satu komponen penting dari setiap pemilihan kepala daerah, atau pilkada, adalah kampanye pendidikan pemilih. Tujuan utama kampanye ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih dalam proses demokrasi, khususnya dalam hal memilih gubernur, bupati, atau walikota. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dijelaskan lebih detail tentang Kampanye Pendidikan Pemilih dalam Pilkada. Tujuan dari Kampanye Pendidikan Pemilih adalah untuk memberi pemilih pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hak mereka untuk memilih, serta betapa pentingnya memilih pemimpin yang baik untuk masyarakat dan kemajuan daerah. Memahami Isu Kampanye berarti memberi tahu pemilih tentang hal-hal penting yang menjadi fokus kampanye calon kepala daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Mereka tidak hanya harus mengawasi proses dan menjaga integritas, tetapi juga harus memberi tahu orang tentang pentingnya partisipasi demokratis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kampanye dilakukan secara adil dan mencegah praktik politik uang yang melanggar undang-undang. Penyuluhan dan Pendidikan Pemilih, masyarakat sipil, dan LSM turut membantu pemilih memahami proses pemilu, hak dan kewajiban mereka, dan pentingnya berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah. Partisipasi dalam debat publik dan diskusi sangat penting untuk Pilkada 2024 karena memungkinkan pemilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang visi, misi, dan rencana calon kepala daerah. Partisipasi dalam debat publik dan diskusi juga memperkuat demokrasi dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dengan demikian, partisipasi dalam debat publik dan diskusi juga akan membantu pemilih membuat keputusan yang lebih informasional. Tujuan debat publik dan diskusi selama Pilkada adalah untuk memberi calon kepala daerah kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka tentang berbagai masalah penting kepada pemilih. Ini memungkinkan pemilih untuk mendengarkan berbagai pendapat dan cara setiap calon menangani masalah tersebut. Debat dan diskusi dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti debat langsung antara kandidat, forum diskusi terbuka dengan orang lain yang berpartisipasi, atau sesi tanya jawab dengan moderator. Karena Gen Z memiliki populasi terbesar di pemilihan pilkada 2024, meningkatkan partisipasi pemilih melalui media sosial dapat dicapai dengan mudah karena berbagai proses dan variabel yang dapat memengaruhinya. Media sosial memudahkan akses cepat dan mudah ke informasi terkini

terkait calon, platform politik, dan masalah kampanye. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran pemilih tentang proses pemilihan dan pilihan yang mereka miliki. Media sosial memungkinkan calon dan pemilih berinteraksi secara langsung, seperti melalui sesi tanya jawab atau diskusi online. Ini memberi pemilih kesempatan untuk bertanya langsung kepada calon tentang rencana mereka dan mendapatkan jawaban secara langsung. Kampanye politik yang menggunakan media sosial memiliki kemampuan untuk memobilisasi basis pemilih, terutama generasi muda yang aktif di platform tersebut. Generasi muda telah secara aktif memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk menyuarakan keinginan mereka, mengkritik, dan memberikan dukungan kepada proses politik. Studi menunjukkan bahwa teknologi sangat penting untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam politik. Itu menunjukkan peran pentingnya dengan memudahkan akses ke informasi, memungkinkan orang untuk berinteraksi secara langsung dengan calon, dan memungkinkan diskusi publik yang lebih terbuka dan terbuka.

Daftar Pustaka

- Adnyanaesa, Pandeia Bagus ; Utama, I Wayan;. "Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7 (1) 2023: 23-27. <https://doi.org/10.32486/dikemas.v7i1.410>
- Fatma, Sjoraida Diah; Ruchiat, Nugraha Aat;. "Upaya Peningkatan Pengetahuan Politik Melalui Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Generasi Z." *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 1 (2) April 2023: 104-111. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i2.20>
- Jannah, Khai Rati, and Hasannudin. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, 2021: 1-15.
- Khakim, Muhammad Salisul;. "Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(1) Maret 2023: 98-116. <https://doi.org/10.47134/villages.v4i1.47>
- Levrita Rahayunie. "Sekda H. Nuryakin Buka secara resmi Rakor Pelaksanaan Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024." *Harian*, Mei Sabtu, 2024. Diakses tanggal 11 Mei 2024 10:41 <http://mmc.kalteng.go.id/>
- Mahpudin;. "Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi dan Kepercayaan." *Jurnal PolGov*, 1 (2) 2019: 157-197. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i2.55886>

- N.n. "Kemenpora Ajak 56% Pemilih Muda Kawal Proses Pemilu 2024 Jujur dan Adil." *Harian*, 17 Januari Rabu, 2024. diakses tanggal 11 Mei 2024 11:38
<https://www.kemenpora.go.id/>
- Prasetyo, Kuncoro Bayu; Putri, Noviani Achmad; Pramoono, Didi;. "Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Gerakan Voluntarisme Komunitas Milenial." *Bookchapter Pendidikan Universitas Negeri Semarang* , (3), Mei 2022: 9.
<https://doi.org/10.1529/kp.v1i3.48>
- Putra, Febriansyah; Patra, Haldi;. "Analisis Hoax pada Pemilu: Tinjauan dari Perspektif." *Journal of Education and Pedagogy*, 2 (1) 2023: 95-102. :
<https://doi.org/10.24036/nara.v2i1.119>
- Yahya, Arif; Febrianti, Diani; Rasyad, Irfan Fadli;. "Strategi Kampanye Digital Partai Keadilan Sejahtera Menghadapi Pemilu 2024." *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4 (1), Februari 2024: 79-86. <https://doi.org/10.54082/jupin.254>
- Yusrin, Yusrin ; Salpina , Salpina;. "Partisipasi Generasi Millenial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024." *Journal on Education*,5 (3), 2023: 9646-9653.
<https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1842>
- Ferdinand, P; Arsyad, L;. "Analisis Dampak Pilkada Terhadap Stabilitas Politik dan Perekonomian Daerah (Studi Kasus di Provinsi Riau)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan* 3 (2018): 112-121.